

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN PADI DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011–2023

**Hanifah Maghfiroh Sa'adah**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Negeri Surabaya

Email: [hanifahmaghfiroh.21022@mhs.unesa.ac.id](mailto:hanifahmaghfiroh.21022@mhs.unesa.ac.id)

**Drs. Agus Trilaksana**

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Negeri Surabaya

Email: [agustrilaksana@unesa.ac.id](mailto:agustrilaksana@unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pertanian padi di Kabupaten Lamongan selama periode 2011–2023 serta menelaah dampaknya terhadap kondisi ekonomi petani. Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Timur, memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Peneliti mengumpulkan sumber tertulis berupa arsip kebijakan pemerintah daerah terkait intensifikasi pertanian, data produksi padi dari BPS Kabupaten Lamongan, serta artikel surat kabar lokal. Tahap kritik dilakukan dengan pendekatan kritik intern untuk menghubungkan fakta yang diperoleh dari wawancara dan dokumen tertulis. Tahap interpretasi digunakan untuk menganalisis data yang relevan dengan tema penelitian. Tahap akhir yaitu historiografi digunakan untuk menyusun hasil analisis menjadi narasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan intensifikasi pertanian padi diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008, Nomor 29 Tahun 2014, dan Nomor 53 Tahun 2017. Kebijakan ini mencakup pengolahan tanah, penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, irigasi, serta pengelolaan panen dan pasca panen. Pemerintah menerapkan pendekatan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui bantuan alat dan mesin pertanian, akses pembiayaan KUR, penggunaan benih unggul, dan pengendalian hama berbasis PHT. Distribusi air irigasi dikelola oleh HIPPA di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Dinas PU SDA. Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, degradasi tanah, dan penurunan lapangan kerja buruh tani.

**Kata Kunci:** Pertanian Padi, Kebijakan Intensifikasi, Agroindustri, Lamongan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of rice farming policies in Lamongan Regency during the 2011-2023 period and examine its impact on farmers' economic conditions. Lamongan Regency, as one of the largest rice barns in East Java, has an important role in supporting national food security. This research uses the historical method with the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The researcher collected written sources in the form of local government policy archives related to agricultural intensification, rice production data from BPS Lamongan Regency, and local newspaper articles. The criticism stage was conducted using an internal criticism approach to connect facts obtained from interviews and written documents. The interpretation stage was used to analyze data relevant to the research theme. The final stage, historiography, was used to organize the results of the analysis into a scientific narrative. The results show that the rice farming intensification policy is regulated through Regent Regulation No. 55/2008, No. 29/2014, and No. 53/2017. This policy covers tillage, provision of production facilities such as seeds, fertilizers, pesticides, irrigation, as well as harvest and post-harvest management. The government applies an agro-industrial approach to increase the added value of agricultural products. Policy implementation is realized through the assistance of agricultural tools and machinery, access to KUR financing, the use of superior seeds, and IPM-based pest control. Irrigation water distribution is managed by HIPPA under the coordination of the Department of Agriculture and the Department of Public Works and Natural Resources. This policy has a positive impact on increasing farmers' production and income, but also has a negative impact in the form of environmental damage, soil degradation, and decreased employment of farm laborers.*

**Keywords:** Rice Farming, Intensification Policy, Agroindustry, Lamongan.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kontribusi besar dalam sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi. Wilayah ini memiliki luas 1.812,80 hektare dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi geografis Kabupaten Lamongan terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu wilayah utara, tengah, dan selatan, dengan karakteristik lahan pertanian yang bervariasi. Keberadaan lahan yang subur serta iklim yang mendukung menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah melaksanakan kebijakan Revolusi Hijau sejak masa Orde Baru guna meningkatkan produksi beras melalui intensifikasi pertanian. Program ini meliputi penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, serta pengembangan sistem irigasi sebagai penunjang utama kegiatan pertanian.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru telah menggalakkan Revolusi Hijau sebagai bentuk solusi atas krisis pangan. Pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan strategis melalui pendekatan intensifikasi pertanian. Penerapan teknologi pertanian modern seperti benih unggul, pupuk kimia, dan pestisida menjadi bagian dari program Panca Usaha Tani. Pemerintah juga membangun infrastruktur irigasi dan memberikan penyuluhan kepada petani. Kabupaten Lamongan menerapkan kebijakan tersebut melalui program-program yang adaptif terhadap kondisi lokal. Pemerintah daerah meluncurkan program GEMERLAP pada tahun 2011 sebagai bentuk dukungan terhadap produktivitas petani. Kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan kesejahteraan petani Lamongan.<sup>2</sup>

Kebijakan intensifikasi di Kabupaten Lamongan difokuskan pada penguatan sarana produksi dan pengelolaan pertanian secara efisien. Pemerintah menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih bersertifikat, pupuk bersubsidi, serta pestisida. Pemerintah juga mengembangkan sistem irigasi teknis yang dikelola bersama masyarakat melalui HIPPA. Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan penyuluh dan pendampingan teknis kepada kelompok tani. Pemerintah menetapkan program prioritas berbasis agribisnis untuk menjamin keberlanjutan hasil pertanian. Pemerintah mengintegrasikan kegiatan budidaya, panen, dan pasca panen ke dalam satu sistem produksi yang terorganisir. Pemerintah berharap model ini mampu meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah bagi petani.

Petani di Kabupaten Lamongan mengalami berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan pertanian. Petani sering menghadapi keterbatasan pasokan air, terutama saat musim kemarau. Petani juga menghadapi kelangkaan pupuk subsidi dan harga

pestisida yang mahal. Petani sering menggunakan pestisida dalam jumlah berlebih untuk mengatasi serangan hama, terutama wereng coklat. Penggunaan pestisida secara tidak terkontrol menyebabkan munculnya hama resisten dan kerusakan lingkungan. Petani belum sepenuhnya memahami teknologi pertanian modern dan pengelolaan alsintan secara optimal. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada sarana, tetapi juga edukasi dan pendampingan berkelanjutan.

Permasalahan lain yang dihadapi petani Lamongan adalah fluktuasi harga gabah dan biaya produksi yang tinggi. Petani sering mengalami kerugian karena harga jual tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Petani bahkan harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga dua kali lipat dari harga normal. Petani mengalami kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih adil, karena ketergantungan terhadap tengkulak. Petani juga menghadapi masalah kelangkaan tenaga kerja saat musim tanam dan panen. Petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menyewa buruh dari luar daerah seperti Gresik dan Tuban. Pemerintah daerah mencoba mengatasi persoalan ini melalui program pelatihan dan kerja sama antarwilayah.

Penelitian ini memiliki tiga fokus utama, yakni menelaah kebijakan intensifikasi pertanian padi di Kabupaten Lamongan, menganalisis implementasinya di tingkat petani, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap pendapatan serta kesejahteraan petani. Aspek kebijakan yang dikaji meliputi program bantuan alat dan mesin pertanian, distribusi pupuk bersubsidi, serta pembangunan irigasi teknis. Selain itu, penelitian ini juga menggali bagaimana kebijakan tersebut direspons oleh masyarakat tani dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk merekam dinamika kebijakan pertanian di daerah secara kronologis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendukung intensifikasi pertanian padi pada tahun 2011 hingga 2023? (2) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi petani di Kabupaten Lamongan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan intensifikasi pertanian padi dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Penelitian ini memilih tahun 2011 sebagai tahun awal pembahasan karena pada tahun tersebut Pemerintah Daerah Lamongan mulai menerapkan program GEMERLAP (Gerakan Ekonomi Masyarakat Lamongan Berbasis Pedesaan) yang memberikan bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk

<sup>1</sup> Afrida Nurlaily Romadhona, "The Dynamics of Green Revolution Implementation in the Rice Farming Sector in Lamongan from 1970 to 1998," *Jurnal Historica*, vol. 8, no. 1 (2024), hlm. 160.

<sup>2</sup> S. Abbas, *Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung* (Jakarta: Setdal Bimas, 1999), hlm. 86.

menunjang produktivitas pertanian, dan penelitian ini selesai pada tahun 2023 karena pada tahun tersebut Lamongan menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI sebagai daerah Adhikarya Pembangunan Pertanian berkat konsistensinya sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Ilmu sejarah harus mempunyai aturan atau disiplin ilmu, agar bisa dipercaya kebenarannya. Metode penelitian sejarah adalah sebuah tahap untuk mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan sumber-sumber sejarah yang sudah didapatkan untuk merekonstruksi peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi atas empat tahapan, yakni: Heuristik, Kritik, Interpretasi serta Historiografi.

### 1. Heuristik

Heuristik adalah suatu proses dalam penelitian sejarah untuk menemukan serta mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik dari sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber tertulis berupa arsip, antara lain: Salinan kebijakan pemerintah daerah Lamongan mengenai intensifikasi pertanian pada tahun 2011-2023, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dan data produksi padi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan yang tercantum pada dokumen Lamongan Dalam Angka. Serta surat kabar yang berasal dari Memo, Jawa Pos, Momerandum, dan Radar Sulbar. Penelitian ini juga memakai sumber lisan dengan melakukan wawancara kepada para petani yang menjadi pelaku dalam kegiatan pertanian pada tahun 2011-2023, wawancara dengan anggota Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan, Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air Kabupaten

Lamongan. Selain itu sumber yang digunakan adalah dengan merujuk pada buku dan jurnal-jurnal serta sumber pendukung di internet. Tahap selanjutnya setelah mendapatkan sumber sumber tersebut maka dilanjutkan dengan proses lebih dalam yaitu kritik sumber.

### 2. Verifikasi / Kritik Sumber

Verifikasi merupakan aktivitas memeriksa, mengoreksi dan menilai sumber sumber sejarah yang sudah didapatkan sehingga dapat dipisahkan mana yang merupakan sumber penting serta mana yang bukan. Peneliti menggunakan kritik intern untuk membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh pihak-pihak yang diwawancarai, dokumen arsip, dan surat kabar yang ditemukan memang dapat dipercaya. Kegiatan kritik intern berusaha untuk mencari hubungan intrinsik antara beberapa fakta yang diperoleh melalui wawancara dan penelusuran sumber tertulis. Secara

sistematis, kegiatan kritik intern bertujuan untuk mengetahui bagaimana berbagai fakta yang didapat melalui wawancara dan penelusuran sumber tertulis saling berhubungan satu sama lain.

### 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan kegiatan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah. Penafsiran ini dilakukan dengan menelaah lebih lanjut tentang sumber-sumber penelitian yang berhubungan dengan fakta dan tema penelitian. Fakta yang sudah didapatkan selanjutnya dijabarkan dengan memakai ilmu bantu agar bisa diuraikan dan menjelaskan fakta di lapangan dari sudut pandang pertanian dengan lebih lanjut. Dengan demikian, dapat membangun dan menyampaikan makna kepada individu dan masyarakat

### 4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Rekonstruksi sejarah yang diteliti tidak hanya melahirkan fakta, akan tetapi memberikan uraian secara objektif dari suatu permasalahan. Penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk karya yang berjudul "Implementasi Kebijakan dalam Pertanian Padi di Lamongan pada Tahun 2011-2023".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah strategis di pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, daerah ini memiliki topografi yang relatif datar serta didukung oleh jenis tanah aluvial yang sangat subur, sehingga sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Keberadaan Sungai Bengawan Solo dan Waduk Gondang memperkuat sistem irigasi alami yang menunjang pertumbuhan tanaman padi. Luas wilayah Lamongan mencapai 1.812,8 kilometer persegi dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 hingga 20 derajat, menjadikannya daerah yang sangat potensial untuk budidaya tanaman pangan, khususnya padi.<sup>3</sup> Karakteristik alam tersebut memungkinkan kegiatan bercocok tanam dilakukan secara lebih efisien dan produktif.<sup>4</sup> Kondisi ini turut mempengaruhi penetapan berbagai kebijakan pertanian pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan hasil pertanian. Kebijakan intensifikasi pertanian di Kabupaten Lamongan sangat sejalan dengan potensi geografis yang dimilikinya.

Kabupaten Lamongan menunjukkan struktur penduduk yang cukup stabil, dan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Profesi sebagai petani menjadi mata pencaharian utama di banyak kecamatan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki akses lahan pertanian luas. Sektor pertanian tidak hanya menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi, tetapi juga berperan sebagai identitas sosial masyarakat Lamongan. Padi merupakan komoditas

<sup>3</sup> Dinas Pertanian Lamongan. Profil Geografis dan Produksi Padi Kabupaten Lamongan. Lamongan: Dinas Pertanian, 2021.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2012* (Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2012), hlm. 45.



pertanian unggulan yang diusahakan secara luas oleh petani lokal. Luas lahan sawah yang dimiliki cukup signifikan dan tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten sehingga menjadikannya penyumbang utama produksi beras di Jawa Timur. Pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan intensifikasi, meliputi penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, peralatan pertanian, serta perbaikan infrastruktur irigasi. Kebijakan yang terfokus pada penguatan sektor pertanian padi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Lamongan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menerapkan kebijakan intensifikasi pertanian sejak tahun 2011 hingga 2023 secara sistematis. Pemerintah merancang kebijakan ini untuk meningkatkan produktivitas padi secara menyeluruh. Pemerintah juga menargetkan ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari program nasional. Pemerintah mendorong kesejahteraan petani dengan pendekatan pembangunan sektor pertanian. Pemerintah melaksanakan intensifikasi melalui penguatan sarana produksi dan teknologi pertanian. Pemerintah menambah kegiatan seperti penyuluhan pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan pengolahan tanah sebagai tahap awal dalam budidaya padi. Pemerintah mencantumkan kebijakan ini dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 53 Tahun 2017.<sup>5</sup> Pemerintah mendorong petani untuk mengelola tanah secara efisien dan tepat waktu. Pemerintah memberikan bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda dua dan empat. Pemerintah juga menyediakan pompa air untuk membantu pengolahan tanah. Pemerintah berharap penggunaan alsintan dapat menurunkan biaya dan meningkatkan hasil tanam.

Pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan sarana produksi berupa benih, pupuk, dan pestisida. Pemerintah mewajibkan petani memakai benih unggul berlabel biru agar hasil panen berkualitas. Pemerintah mengatur distribusi pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pemerintah menyalurkan pupuk seperti urea, SP-36, dan NPK kepada kelompok tani. Pemerintah juga memberikan pestisida untuk mendukung pengendalian hama terpadu. Pemerintah mengarahkan penggunaan pestisida secara ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem.<sup>6</sup>

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengembangkan sistem irigasi sebagai bagian dari strategi intensifikasi. Pemerintah menekankan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan air melalui Perda Nomor

15 Tahun 2011.<sup>7</sup> Pemerintah menyerahkan pengelolaan irigasi kepada HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap distribusi air oleh HIPPA. Pemerintah ingin memastikan semua lahan sawah memperoleh air secara merata. Pemerintah memprioritaskan daerah yang rawan kekeringan agar tidak tertinggal dalam hasil panen.

Pemerintah meluncurkan program GEMERLAP pada tahun 2011 melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011. Pemerintah mendesain program ini untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis pedesaan. Pemerintah menyalurkan alat dan mesin pertanian seperti traktor dan pompa air kepada petani. Pemerintah berharap petani mampu memperluas lahan tanam dan menekan biaya produksi. Pemerintah menilai program ini berhasil mendukung produktivitas petani di berbagai kecamatan. Pemerintah menjadikan GEMERLAP sebagai bentuk konkret dukungan terhadap kebijakan intensifikasi.<sup>8</sup>

Pemerintah melaksanakan penyuluhan pertanian sebagai bagian dari penguatan kapasitas petani. Pemerintah menyesuaikan penyuluhan dengan kebutuhan petani di masing-masing wilayah. Pemerintah mengutus penyuluh lapangan untuk memberikan pelatihan teknik budidaya modern. Pemerintah menyampaikan materi tentang efisiensi pemupukan dan manajemen usaha tani. Pemerintah ingin agar petani mampu berinovasi dalam praktik pertanian harian. Pemerintah menjadikan penyuluh sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan memperkuat sektor agroindustri melalui program INBIS. Pemerintah mengintegrasikan kegiatan pertanian mulai dari on-farm hingga off-farm. Pemerintah mendukung pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk pertanian. Pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah dari hasil panen petani. Pemerintah mendorong petani menjadi pelaku usaha tani yang efisien dan mandiri. Pemerintah menargetkan terciptanya daya saing tinggi di pasar pertanian lokal maupun regional.<sup>9</sup>

Pemerintah menetapkan kebijakan pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil produksi. Pemerintah membangun gudang penyimpanan dan menyediakan mesin pengering padi (dryer). Pemerintah memperkenalkan penggilingan padi modern untuk meningkatkan mutu beras. Pemerintah mendorong petani menjual hasil panen ke Bulog atau koperasi. Pemerintah ingin harga jual padi lebih stabil dan menguntungkan petani. Pemerintah berupaya

<sup>5</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2017*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2017.

<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2022*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021.

<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana*

*Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011–2015*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2011.

<sup>8</sup> Anita Rahayu dan Tauran, "Dampak Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan (Studi Pada Kelompok Ternak Sumber Rejeki)," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 12, no. 2 (2023), hlm. 117.

<sup>9</sup> Hermanto, dkk. *Buku Pengantar Agribisnis*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak lokal.<sup>10</sup>

Implementasi kebijakan pertanian padi di Kabupaten Lamongan dilakukan secara nyata di lapangan. Pemerintah daerah menerapkan pendekatan berbasis agroindustri sebagai strategi utama dalam memperkuat sektor pertanian. Model agroindustri ini melibatkan integrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran produk. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari hasil pertanian padi. Pemerintah daerah berharap melalui pendekatan ini, petani dapat terhubung langsung dengan pasar dan dunia usaha. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan petani terhadap input produksi dari luar daerah. Penerapan agroindustri menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan kompetitif.

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengembangkan program Desa Mandiri dan Inkubator Bisnis Pertanian (INBIS) sebagai upaya integratif dalam membangun pertanian berbasis agroindustri. Program ini melibatkan petani secara aktif dalam pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis pertanian. Pemerintah mendorong petani untuk memproduksi benih lokal berkualitas tinggi dan menjual hasil pertanian secara langsung ke pasar. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap input impor dan memperluas akses pasar bagi produk lokal. Pemerintah juga memfasilitasi kerjasama antara petani, koperasi, dan pelaku usaha dalam sistem rantai pasok pertanian. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong petani mengelola usaha tani secara mandiri dan profesional. Pendekatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem agribisnis yang produktif dan berdaya saing tinggi.<sup>11</sup>

Implementasi kebijakan sarana produksi di Lamongan menyangkut modal, pengolahan tanah, benih, pupuk, dan pestisida sebagai faktor penting dalam produktivitas pertanian padi. Pemerintah daerah memberikan bantuan modal melalui koperasi dan kelompok tani serta menyalurkan alsintan untuk meringankan beban biaya produksi petani. Petani mulai beralih ke mekanisasi dalam pengolahan tanah dengan menggunakan traktor dan mesin tanam untuk mempercepat proses budidaya. Benih unggul berlabel biru seperti Inpari dan IR 64 terbukti meningkatkan hasil panen di beberapa kecamatan. Pupuk bersubsidi seperti urea dan NPK disalurkan secara bertahap melalui KUD, meskipun masih ada kendala dalam distribusi dan stok di kios pertanian. Penyuluhan oleh petugas lapangan mendorong petani menerapkan pola pemupukan

berimbang yang berdampak langsung pada kenaikan produktivitas lahan. Pengendalian hama dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan seperti sistem pengendalian hama terpadu, meskipun hama tikus tetap menjadi ancaman utama.<sup>12</sup>

Pengelolaan irigasi pertanian padi di Kabupaten Lamongan dilandasi oleh Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan irigasi sebagai infrastruktur strategis. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk menjamin efisiensi pemanfaatan air irigasi dan keberlanjutan pertanian. Jaringan irigasi dibangun dan diperbaiki secara bertahap guna memastikan seluruh wilayah pertanian mendapatkan pasokan air yang memadai sepanjang tahun. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan irigasi diserahkan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) agar pelaksanaannya lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah tetap mengawasi pelaksanaan pengelolaan irigasi agar adil dan efisien, serta memberi pelatihan teknis bagi anggota HIPPA.<sup>13</sup>

Irigasi yang memadai terbukti mendukung intensifikasi pertanian, terutama dalam pola tanam dua hingga tiga kali setahun di sebagian besar wilayah Lamongan. Pemerintah membangun dan memperbaiki jaringan irigasi teknis dan setengah teknis di berbagai kecamatan. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa pompa air dan pembuatan sumur dalam bagi daerah yang kesulitan air. Upaya tersebut bertujuan memastikan ketersediaan air irigasi, terutama pada musim kemarau. Beberapa petani masih mengeluhkan kerusakan saluran irigasi sekunder yang belum segera diperbaiki. Kurangnya pemeliharaan rutin dari instansi terkait menyebabkan air tidak mengalir optimal ke lahan pertanian. Kendala teknis seperti ini menjadi tantangan besar dalam menjaga produktivitas pertanian padi secara merata.

Kebijakan panen dan pascapanen juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan efisiensi usaha tani padi. Pemerintah menerapkan penggunaan alat combine harvester untuk mempercepat proses panen dan mengurangi kehilangan hasil. Teknologi ini sangat membantu petani dalam hal efisiensi waktu dan tenaga kerja. Penggunaan alat modern berdampak sosial terhadap berkurangnya kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian. Pemerintah memberikan dukungan kepada koperasi tani dalam bentuk alat penggiling dan pengering gabah untuk meningkatkan kualitas hasil. Distribusi alat pascapanen belum merata ke seluruh kelompok tani di Lamongan. Ketimpangan ini mengakibatkan sebagian petani masih menggunakan cara tradisional dalam proses panen dan pengolahan.

<sup>10</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2017.

<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2016.

<sup>12</sup> Ari Sujanto, Ketua Bidang Pengawas Benih Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis, Lamongan, 30 Januari 2025.

<sup>13</sup> Zaky, staf Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis, 14 Mei 2025.

Kegiatan panen dan pascapanen merupakan aspek krusial dalam kebijakan pertanian padi karena secara langsung memengaruhi kualitas hasil serta harga jual gabah yang diterima oleh petani. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara aktif mendorong penggunaan alat panen modern seperti combine harvester guna meminimalisasi kehilangan hasil dan meningkatkan efisiensi waktu kerja di lapangan.<sup>14</sup>

Petani umumnya melakukan penjemuran gabah di lantai jemur atau menyimpannya di gudang milik kelompok tani setelah proses panen, sebelum hasil tersebut dijual kepada tengkulak atau pihak Bulog. Sebagian besar petani masih menggunakan sistem penjualan tebasan karena keterbatasan akses terhadap sarana pascapanen serta desakan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan berupa mesin pengering dan penggilingan skala kecil untuk meningkatkan mutu gabah kering yang dihasilkan. Penyerapan gabah oleh Bulog belum merata di seluruh wilayah, sehingga daya tawar petani terhadap harga pasar tetap lemah. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pascapanen perlu dioptimalkan agar petani memperoleh harga jual yang lebih kompetitif serta mengurangi ketergantungan terhadap jalur distribusi informal seperti tengkulak.

Peningkatan produksi padi di Kabupaten Lamongan selama periode 2011 hingga 2023 mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan intensifikasi pertanian yang dijalankan pemerintah daerah secara konsisten.<sup>15</sup> Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lamongan, produksi padi meningkat dari 857.637 ton pada tahun 2011 menjadi 1.200.360 ton pada tahun 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 1.111.651 ton pada tahun 2023.<sup>16</sup> Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh penggunaan benih unggul seperti Inpari, Ciherang, dan IR 64 yang terbukti lebih produktif dan tahan hama. Peran aktif Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam pengelolaan irigasi serta distribusi pupuk bersubsidi yang lebih merata juga turut mendukung pencapaian ini. Selain itu, program penyuluhan dan sistem tanam serempak memperkuat efisiensi siklus produksi padi di berbagai kecamatan. Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan teknis, dukungan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi mampu menjadikan Lamongan sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Timur.

Peningkatan produksi padi berdampak langsung pada pendapatan petani di Lamongan. Data menunjukkan bahwa petani yang memiliki lahan sawah 4.000 m<sup>2</sup> memperoleh pendapatan bersih antara

Rp3.500.000 hingga Rp5.250.000 tergantung pada jenis gabah yang dijual, apakah dalam bentuk basah atau kering.<sup>17</sup> Perhitungan tersebut sudah mempertimbangkan biaya operasional seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja. Banyak petani yang masih bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Tengkulak sering menawarkan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), tetapi dalam praktiknya melakukan potongan timbangan secara sepihak dan pembayaran secara mencicil. Praktik ini mengurangi margin keuntungan petani meskipun secara nominal mereka tetap mendapat penghasilan. Intervensi pemerintah dalam penguatan akses pasar dan pembentukan koperasi pemasaran menjadi krusial.

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap turut memengaruhi pola distribusi pendapatan di sektor pertanian. Umumnya, petani penggarap memperoleh 70% dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapatkan sisanya sebesar 30%.<sup>18</sup> Komposisi ini muncul karena beban pembiayaan sarana produksi seluruhnya ditanggung oleh petani penggarap. Penghasilan petani penggarap dapat mencapai Rp12.250.000 per musim dalam kondisi panen yang baik. Penurunan hasil menyebabkan keuntungan berkurang secara signifikan, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian. Ketahanan ekonomi petani sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel produksi yang kompleks. Perlindungan terhadap petani penggarap perlu diperkuat melalui program jaminan hasil panen dan subsidi risiko pertanian.

Kehilangan kesempatan kerja musiman membuat buruh tani kehilangan sumber pendapatan utama. Buruh tani yang masih bekerja memperoleh upah bervariasi antara Rp1.300.000 hingga Rp2.000.000 per bulan, tergantung jumlah hari kerja dan kondisi fisik.<sup>19</sup> Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan kesejahteraan yang ditimbulkan oleh pergeseran sistem pertanian tradisional menuju mekanisasi. Modernisasi seharusnya diiringi dengan program pelatihan ulang atau alih profesi bagi buruh tani. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk memberikan keterampilan baru di sektor agroindustri atau jasa pertanian.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2023, pemerintah mencatat bahwa sebanyak 40 persen petani di Indonesia menguasai lahan kurang dari 0,25 hektare, yang dikategorikan sebagai petani sangat gurem. Petani gurem secara umum adalah petani yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare, dan jumlahnya

<sup>14</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2016.

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan dalam Angka 2012. Lamongan: BPS, 2012.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan dalam Angka 2024. Lamongan: BPS, 2024.

<sup>17</sup> Yono, petani padi di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2025.

<sup>18</sup> Hartini, petani padi di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2025.

<sup>19</sup> Jasuki, buruh tani di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2025.



mencapai 62,14 persen dari total petani.<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) gurem pada tahun 2023 mencapai 16,89 juta, mengalami kenaikan sebesar 18,49 persen dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 14,25 juta. Secara keseluruhan, jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia tercatat sebanyak 27.802.434 orang, dan dari jumlah tersebut, 17.251.432 orang tergolong sebagai petani gurem.<sup>21</sup> Peningkatan jumlah petani gurem menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam distribusi lahan pertanian. Sementara itu, rata-rata luas lahan yang dikuasai RTUP pada tahun 2013 sebesar 0,89 hektare, meningkat 118,80 persen dibandingkan tahun 2003 yang hanya 0,41 hektare.<sup>22</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan rata-rata penguasaan lahan secara nasional, mayoritas petani masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan pertanian yang memadai.

Peneliti menyatakan bahwa analisis kesejahteraan petani tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan pendapatan petani dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan sebesar Rp2.701.977, karena faktor-faktor lain juga perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.<sup>23</sup> Salah satu contoh yang diambil adalah petani dengan kepemilikan lahan seluas 4.000 meter persegi yang dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp3.500.000 per bulan. Pendapatan tersebut memang lebih tinggi dari UMK, namun status kemakmuran petani tidak bisa ditentukan semata-mata dari perbandingan angka tersebut. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap skala produksi dan tingkat pendapatan yang diperoleh petani. Jika lahan petani lebih kecil, maka pendapatannya sangat mungkin berada di bawah UMK dan tidak bisa langsung dikatakan sejahtera. Sebagian besar petani di Kabupaten Lamongan juga memiliki sumber penghasilan tambahan, seperti bekerja sebagai buruh tani, beternak, atau melakukan pekerjaan musiman. Kesejahteraan petani bersifat relatif dan tergantung pada berbagai variabel, bukan hanya pada hasil pertanian padi semata.

Modernisasi pertanian padi di Kabupaten Lamongan menunjukkan transformasi besar sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi. Pemerintah Orde Baru mengendalikan sektor pertanian secara ketat melalui kebijakan yang sentralistik dan otoriter. Petani diwajibkan mengikuti arahan seperti jenis benih, jadwal tanam, dan penggunaan pupuk sesuai program pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi tegas untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Pendekatan top-down ini berhasil menciptakan keseragaman pola tanam dan peningkatan produktivitas. Setelah Reformasi, peran pemerintah dalam pengendalian pertanian melemah dan bergeser menjadi desentralistik. Petani diberikan kebebasan menentukan sendiri jenis tanaman dan waktu tanam, tetapi kurangnya arahan menyebabkan ketidaksesuaian dengan pasar dan musim tanam.<sup>24</sup>

Desentralisasi kebijakan pertanian membuka ruang partisipasi petani, namun juga menghadirkan tantangan baru. Ketidakterpaduan arah kebijakan antarwilayah menurunkan efektivitas program pertanian. Pemerintah daerah harus mengembangkan strategi baru agar tetap mampu mengarahkan sektor pertanian secara optimal. Kabupaten Lamongan merespons kondisi ini dengan mendorong pengembangan sistem agroindustri berbasis pertanian. Pendekatan agroindustri mencakup proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian secara terintegrasi. Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Strategi ini menempatkan pertanian sebagai sektor ekonomi produktif yang berbasis inovasi dan efisiensi.

Implementasi sistem agroindustri di Lamongan menghadapi kendala struktural yang cukup kompleks. Keterbatasan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk berkualitas, dan alat pertanian modern menjadi hambatan utama. Sistem irigasi yang tidak memadai memperburuk produktivitas karena hanya memungkinkan panen satu kali setahun. Kualitas hasil panen menurun akibat kekurangan air dan penanganan pascapanen yang belum optimal. Pendapatan petani pun merosot dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Pemerintah daerah melakukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur irigasi dan penyediaan sarana produksi. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi usaha tani dan mendukung keberhasilan sistem agroindustri.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik, *Sensus Pertanian 2023: Laporan Nasional* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 18.

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, *Sensus Pertanian 2013: Laporan Nasional* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 32.

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik, *Sensus Pertanian 2003: Laporan Nasional* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2004), hlm. 25.

<sup>23</sup> Gubernur Jawa Timur, *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023*, (Surabaya: Kantor Gubernur Jawa Timur, 7 Desember 2022).

<sup>24</sup> S. Abbas, *Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung* (Jakarta: Setdal Bimas, 1999), hlm. 86.

<sup>25</sup> Arifin dan Arsyad Biba, *Pengantar Agroindustri*. Bandung: Mujahid Press, 2017.

Penerapan teknologi modern dalam setiap tahapan budidaya padi berdampak pada efisiensi produksi dan perubahan ekosistem. Traktor digunakan untuk pengolahan tanah, namun menyebabkan pemadatan lapisan bawah tanah. Struktur tanah yang padat menghambat infiltrasi air dan pertumbuhan akar tanaman. Penggunaan pompa air meningkatkan akses irigasi, tetapi ekstraksi air tanah berlebihan menurunkan cadangan air bawah tanah. Pupuk kimia mempercepat pertumbuhan tanaman, tetapi menurunkan kualitas tanah dan mencemari badan air. Pestisida kimia menekan hama secara cepat, namun memicu resistensi dan membahayakan organisme non-target. Teknologi drone dan combine harvester mempercepat proses produksi, tetapi menimbulkan biaya tinggi dan risiko ekologis. Mekanisasi ini menuntut regulasi dan pelatihan agar dampaknya dapat diminimalkan.<sup>26</sup>

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam pendekatan kebijakan pertanian dibandingkan masa Orde Baru. Jika pada masa Orde Baru pemerintah bersifat sentralistik dan otoriter, maka kini pendekatannya lebih partisipatif dan desentralistik. Petani memiliki keleluasaan dalam memilih bibit, jadwal tanam, dan model usaha tani, walau koordinasi menjadi lebih menantang. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menyusun strategi agar dapat menjawab dinamika lokal secara tepat sasaran. Kebijakan tidak lagi bersifat komando dari pusat, melainkan hasil musyawarah bersama antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha tani. Model ini memberi peluang besar bagi inovasi dan lokalitas, tetapi juga menuntut penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah perlu menyediakan sarana sekaligus membangun ekosistem pertanian yang demokratis, adaptif, dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Secara umum, implementasi kebijakan intensifikasi pertanian padi di Kabupaten Lamongan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani. Tantangan masih terdapat dalam pemerataan akses teknologi, keadilan distribusi hasil, dan keberlanjutan sistem produksi. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh sinergi antarsektor, penguatan kelembagaan petani, serta kebijakan yang responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Konsistensi pelaksanaan hal tersebut akan menjadikan sektor pertanian Lamongan tidak hanya sebagai penyokong ketahanan pangan, tetapi juga pilar utama kesejahteraan masyarakat desa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kebijakan intensifikasi pertanian padi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 hingga 2023 merujuk pada dasar hukum berupa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2017 tentang *Pedoman Intensifikasi Pertanian Padi di Kabupaten Lamongan*. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah menetapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pengaturan secara sistematis terhadap seluruh tahapan usaha tani, mulai dari pengolahan tanah sebelum penanaman, penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida, hingga pada aspek pengelolaan irigasi, serta kegiatan panen dan pasca panen. Seluruh komponen tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Lamongan.

Kebijakan dalam pertanian padi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 hingga 2023 menunjukkan penerapan sistem pertanian berbasis agroindustri. Sistem ini bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui proses pengolahan produk menjadi bentuk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Konsep agroindustri menekankan pentingnya diversifikasi dan pengolahan hasil panen agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan memberi keuntungan ekonomi bagi petani. Pemerintah daerah melalui Pedoman Intensifikasi Pertanian Tahun 2022 mendorong terbentuknya unit-unit usaha agroindustri berbasis komunitas petani. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas peluang pemasaran, mengembangkan usaha tani berkelanjutan, serta memperkuat posisi ekonomi petani. Perbandingan antara era Orde Baru dan era Reformasi menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam pengembangan pertanian, dari sistem yang sentralistik menjadi sistem partisipatif yang menekankan efisiensi dan pemberdayaan masyarakat tani.

Implementasi kebijakan intensifikasi pertanian di Kabupaten Lamongan tampak melalui penyediaan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian, termasuk bantuan traktor yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan tanah sebelum penanaman. Pemerintah juga memberikan akses pembiayaan usaha kepada petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sebelumnya dikenal sebagai Kredit Usaha Tani (KUT), dan disalurkan melalui bank-bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Petani di Kabupaten Lamongan menggunakan benih berlabel biru yang telah terverifikasi, seperti varietas Inpari 32, Inpari 42, Ciherang, dan IR 64, serta berbagai jenis pupuk seperti urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik, meskipun distribusi pupuk bersubsidi masih belum merata. Pengendalian hama dilakukan melalui penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang

<sup>26</sup> Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2022*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021.

<sup>27</sup> Afrida Nurlaily Romadhona, "The Dynamics of Green Revolution Implementation in the Rice Farming Sector in Lamongan from 1970 to 1998," *Jurnal Historica*, vol. 8, no. 1 (2024), hlm. 162.



menggabungkan pendekatan ekologis dan teknologi pertanian. Kebijakan pada aspek irigasi, menitikberatkan pada peran Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, dengan tugas utama mengelola distribusi air irigasi ke lahan persawahan. Pemerintah juga menerapkan konsep agroindustri dalam kegiatan panen dan pasca panen untuk mendorong pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah ekonomi. Sebagian besar petani di Kabupaten Lamongan masih menjual hasil panennya langsung kepada tengkulak karena faktor kemudahan akses, proses transaksi yang cepat, lokasi yang dekat, serta minimnya persyaratan administratif.

Implementasi kebijakan intensifikasi pertanian di Kabupaten Lamongan memberikan dampak ekonomi yang bersifat ganda bagi kehidupan petani. Dampak positif mencakup peningkatan produksi padi, peningkatan pendapatan petani, serta pergeseran pola budidaya dari sistem tradisional menuju sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan produktif. Modernisasi melalui penggunaan alat dan mesin pertanian mempercepat proses budidaya dan memperluas cakupan lahan yang dapat diolah. Dampak negatif muncul akibat penggunaan traktor secara berlebihan yang menyebabkan pemadatan tanah, serta pembakaran bahan bakar fosil yang meningkatkan emisi karbon dan memperparah perubahan iklim. Pengambilan air tanah secara berlebihan menurunkan muka air tanah dan merusak ekosistem bawah permukaan, sedangkan penggunaan air yang tidak bijak menimbulkan ketidakseimbangan ekologi dan mengancam ketersediaan air bersih. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan menurunkan kualitas tanah, mencemari air, memicu resistensi hama, dan menciptakan ketergantungan petani terhadap input kimia. Modernisasi pertanian juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, sehingga banyak buruh tani kehilangan mata pencaharian dan menciptakan tantangan baru dalam aspek sosial dan lingkungan.

#### A. Saran

Pemerintah Kabupaten Lamongan disarankan untuk meningkatkan efektivitas distribusi sarana dan prasarana pertanian, khususnya pupuk bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan di kalangan petani. Program pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani perlu diperluas dan ditingkatkan secara intensif untuk mendorong peningkatan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi pertanian yang adaptif terhadap tantangan zaman. Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan serta perluasan jaringan irigasi secara terintegrasi guna menjamin ketersediaan air bagi seluruh lahan pertanian, terutama pada musim kemarau. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat petani harus diperkuat dalam pengembangan sistem agribisnis yang holistik dari hulu hingga hilir. Langkah-langkah tersebut akan memastikan ketahanan pangan daerah terjaga dan

kesejahteraan petani di Kabupaten Lamongan meningkat secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Arsip

- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011–2015*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2011.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011–2031*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2011.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2014.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2008*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2008.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2016.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2017*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2017.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2022*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamongan*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2017.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021*. Lamongan: Bappeda Kabupaten Lamongan, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2012*. Lamongan: BPS, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2019*. Lamongan: BPS, 2019.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2022*. Lamongan: BPS, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2023*. Lamongan: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2024*. Lamongan: BPS, 2024.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Pertanian 2023: Laporan Nasional* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 18.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Pertanian 2013: Laporan Nasional* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 32.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Pertanian 2003: Laporan Nasional* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2004), hlm. 25.
- Gubernur Jawa Timur. *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023*, (Surabaya: Kantor Gubernur Jawa Timur, 7 Desember 2022).

#### B. Wawancara

- Ari Sujanto, Ketua Bidang Pengawas Benih Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis, Lamongan, 30 Januari 2025.
- Hanik, staf administrasi Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis, Lamongan, 30 Januari 2025.
- Hartini, petani Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 27 Januari 2025.
- Esti, Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Babat. Wawancara oleh penulis, 7 Maret 2025.
- Waining, petani di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Januari 2025.
- Adi, petani padi di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2025.
- Yono, petani padi di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2025.
- Mas Ghufro, staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis, 15 Januari 2025.
- Raji, petani di Kecamatan Modo. Wawancara oleh penulis, 16 Januari 2025.
- Sulis, petani di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Januari 2025.
- Siti, buruh tani di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Januari 2025.
- Zaky, staf Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis, 14 Mei 2025.
- Fahrudin Yusuf, Petugas Pemantauan Waduk Prijetan, wawancara oleh penulis, Lamongan, 15 Januari 2025.

#### C. Surat Kabar

- Memorandum. 2016. *Petani Lamongan kesulitan pupuk subsidi*. Koran Memorandum. 1 Desember 2016.
- Radar. 2018. *Air irigasi di Bengawan Jero tidak merata*. Koran Radar. 11 Agustus 2018.
- Memo. 2015. *Perputaran uang dari budidaya ikan capai Rp972 miliar*. Koran Memo. 5 Februari 2015.
- Memo. 2015. *Tahun ini, curah hujan rendah*. Koran Memo. 5 Februari 2015.
- Memo. 2015. *Budidaya lele terpal jadi komoditas tambahan*. Koran Memo. 6 Februari 2015.
- Memo. 2015. *Wujudkan swasembada pangan*. Koran Memo. 5 Februari 2015.
- Radar. 2020. *Musim penghujan, ribuan hektar sawah mulai ditanami padi*. Koran Radar. 11 Desember 2020.
- Jawa Pos. 2021. *Transformasi pertanian tradisional ke modern*. Jawa Pos. 28 Februari 2021.
- Radar Sulbar. 2017. *Petani ramai-ramai jual perhiasan emas*. Radar Sulbar. 3 November 2017.
- Adi Sucipto. 2018. *Pompa air sungai, HIPPA jadi andalan petani*. Kompas.id, 25 Mei 2018.
- Eko Sudjarwo. 2024. *Kekeringan di Lamongan makin meluas, 114 dusun terdampak*. detikJatim, 13 Oktober 2024.

#### D. Buku

- Abbas, S. *Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung*. Jakarta: Setdal Bimas, 1999.
- Arifin dan Arsyad Biba. *Pengantar Agroindustri*. Bandung: Mujahid Press, 2017.
- Hermanto, dkk. *Buku Pengantar Agribisnis*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Husodo, S.Y., dkk. *Pertanian Mandiri: Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Depok: Penebar Swadaya, 2009.
- Soekartawi, R.H. *Pengantar Agribisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

#### E. Jurnal Ilmiah

- Afrida Nurlaily Romadhona. "The Dynamics of Green Revolution Implementation in the Rice Farming Sector in Lamongan from 1970 to 1998." *Jurnal Historica*, vol. 8, no. 1 (Juni 2024): 160.
- Bambang Nuryanto. "Pengendalian Penyakit Tanaman Padi Berwawasan Lingkungan Melalui Pengelolaan Komponen Epidemik." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, vol. 37, no. 1 (Juni 2018): 2.
- Wiwik Ambarsari, Vitus Dwi Yuniarto Budi Ismadi, dan Agus Setiadi. "Upaya Pengembangan Agribisnis Padi (*Oryza sativa* L.) di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, vol. 3, no. 1 (Juni 2015): 67–82.
- Eyna Sundusia, Hamidah Hendrarini, dan Prasmita Dian Wijayati. "Pengembangan Agribisnis Berbasis

- Komoditas Unggulan Subsektor Hortikultura Buah-Buahan Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 24, no. 2 (2023): 12.
- Umi Muawanah. “Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani.” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 24, no. 1 (2023): 10–20.
- Henny Eka Pratiwi dan Ketut Prasetyo. *Analisis Tingkat Kerawanan Banjir di Kabupaten Lamongan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020.
- Nina Nur Melia dan Agus Sutedjo. *Kajian Geografis Mengenai Produktivitas Usaha Tani Padi di Kabupaten Lamongan*. Lamongan: Universitas Negeri Surabaya, 2012.
- Dinas Pertanian Lamongan. *Profil Geografis dan Produksi Padi Kabupaten Lamongan*. Lamongan: Dinas Pertanian, 2021.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Fasilitasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)*. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, tanpa tahun.
- Pratiwi, Sri Hariningsih. *Pertumbuhan dan Hasil Padi (Oryza sativa L.) Sawah pada Berbagai Metode Tanam dengan Pemberian Pupuk Organik*. Gontor AGROTECH Science Journal, Vol. 2, No. 2, hlm. 1–17. Universitas Darussalam Gontor. 2016.
- Harahap et al., “Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Padi Melalui Valuasi Ekonomi,” *Jurnal Litbang Pertanian*, vol. 27, no. 1 (2008): 15–27.
- Faqih Udin, “Investasi dan Pemilihan Teknologi Penggilingan pada Agroindustri Padi dengan Pendekatan Fuzzy: Studi Kasus di Kabupaten Cianjur,” *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, vol. 25, no. 1 (2015): 1–14.
- Purwantini TB dan Susilowati SH, “Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen terhadap Kelembagaan Usaha Tani Padi,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 16, no. 1 (2018): 73–88.
- Eyna Sundusia, “Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Subsektor Hortikultura Buah-Buahan Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 24, no. 2 (2023), hlm. 12.
- Fajar Annas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Desa Bakalrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Ecobuss)* vol. 9, no. 2 (September 2021), hlm 70.
- Nur Laili Prihatiningsih, “Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Pemetaan Kawasan Pertanian di Daerah Pegunungan Kapur Kendeng Utara (Studi Kasus: Kawasan Karst Lamongan),” *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya* (Juni 2019), hlm. 10–25.
- Herlinawati, “Adaptasi Petani pada Banjir Musiman di Desa Mojodadi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan,” *Swara Bhumi: Jurnal Pendidikan Geografi*, vol. 2, no. 1 (2013): 1–15.
- Wenni Tania Defriyanti, *Pengaruh Luas Lahan Sawah dan Luas Tanam terhadap Produksi Padi di Sumatera Selatan Melalui Analisis Regresi, Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, vol. 2, no. 2 (2019): 122–125.
- Gilang Fajar Setiawan, Zainul Arifin, dan Titis Surya Maha Rianti, “Analisis Efisiensi Usahatani Padi (*Oryza sativa* L.) di Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, vol. 3, no. 1 (2023): 15–27.
- Dian Noviwiyannah dan Muhammad Halley Yudhistira, “Pengaruh Luas Lahan Sawah terhadap Produksi dan Konsumsi Pangan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, vol. 8, no. 3 (2024): 45–60.
- A.H. Maftuh Hafidh Zuhdi, *Karakteristik Retensi Air Tanah untuk Analisis Pola Tanam pada Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan Berbeda di Kabupaten Lamongan*, *Jurnal Tanah dan Iklim* 46, no. 1 (2022), hlm. 15.
- Renaldi A. Rosandi, “Optimasi Pola Operasi Waduk Maduran Kabupaten Lamongan,” *Axial: Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi*, vol. 11, no. 1 (2023), hlm. 5–18.
- Fuquh Rahmat Shaleh dan Norma Aprilia Fanni, “Status Kesuburan Perairan di Waduk Joto, Lamongan,” *Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan*. vol. 19, no. 2 (Desember 2021), hlm. 85–94.
- H. Suhartoyo, dkk., *Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2017* (Lamongan: Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan, 2016), hlm. 5.
- F. Skripsi**
- Alfina Amirotnunnasikha. *Pengaruh Faktor Produktivitas Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan* (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).
- M. S. Wahyudi dan Tineke Mandang, *Pengaruh Pemberian Sekam pada Tanah untuk Mengurangi Pemadatan Akibat Lintasan Traktor* (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 1994).
- Kurnia Tri Retno Wulan, *Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP sebagai Inovasi dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Pedesaan (Studi pada Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)* (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, 2014).
- Sulis, petani di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Januari 2025.



Siti, buruh tani di Kecamatan Kedungpring. Wawancara oleh penulis, 15 Januari 2025.

Zaky, staf Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Wawancara oleh penulis, 14 Mei 2025.

Fahrudin Yusuf, Petugas Pemantauan Waduk Prijetan, wawancara oleh penulis, Lamongan, 15 Januari 2025.

**G. Sumber Internet**

<https://www.antaranews.com/berita/688898/banjir-rendam-enam-kecamatan-di-kabupaten-lamongan>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2979080/1-321-hektar-lahan-pertanian-di-lamongan-kekurangan-air>

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7585423/kekeringan-di-lamongan-makin-meluas-114-dusun-terdampak>



**UNESA**

Universitas Negeri Surabaya